

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Zachari Abdallah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
ariey_cosmoride@yahoo.com

Maryanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
maryanto.yanto@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the Kerinci Regency in 2008 to 2010. This type of research is type of research that is Qualitative and quantitative descriptive, using secondary data, namely data sourced from the financial statements of district government of Kerinci that has been audited by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) from 2008-2015. Analysis of the regional financial performance of Kerinci Regency is important information, especially for making policies in managing regional finances and assessing the government managed to manage its finances well. And has a positive impact on the welfare of the community. One of the measuring tools that can be used to analyze the regional performance of Kerinci Regency in managing regional finances is to conduct independence Ratio analysis, Regional Dependency Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio.

Keywords: *Regional Financial Independence Ratio, Regional Dependency Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Kerinci merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah Kabupaten Kerinci dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi.

Kata kunci: *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Pemerintahan atau organisasi publik saat ini juga menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan otonomi daerah karena salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, merubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kearah yang lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. (Fransisco Bwariat, 2013).

Penilaian kinerja keuangan suatu instansi pemerintah daerah tidak hanya bisa dilihat berdasarkan rasio keuangan pada APBD tetapi juga bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dikatakan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh pihak independent Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Empat opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP), *qualified* (wajar dengan pengecualian/WDP), *adverse* (tidak wajar/TW) dan *disclaimer* (tidak memberikan pendapat/TMP).

Keempat opini tersebut opini terbagus adalah *unqualified* yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunaannya dan berbeda dengan *disclaimer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), sehingga baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Tahun 2010-2013 Kabupaten Kerinci mendapatkan opini (wajar dengan pengecualian/WDP) ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci masih ada kemungkinan terjadi salah saji yang material. Pada tahun 2014 Kabupaten Kerinci mendapatkan opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP) yang berarti bahwa laporan Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disebutkan bahwa pencapaian prestasi kinerja keuangan pemerintah selama tahun pelaporan diungkapkan atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan pokok yang mempunyai hubungan atau referensi silang dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan.

Penyelenggaraan pengelolaan APBD, kinerja keuangan kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008 hingga 2012 masih termasuk sangat rendah yaitu hanya mencapai tingkat kemandirian

sebesar 4,68% yang berarti bahwa sebagian besar sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber dana dari pemerintah pusat (95,32%) atau kontribusi pendapatan asli daerah adalah 4,68%.

Berdasarkan pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2010 sebesar Rp. 524.217.000, tahun 2011 Belanja mengalami perkembangan sebesar 23,87% atau Rp. 649.338.000.000, tahun 2012 Belanja mengalami perkembangan sebesar 10,96% atau Rp. 720.534.000.000, tahun 2013 Belanja mengalami perkembangan sebesar 10,52% atau Rp. 796.337.000.000, dan tahun 2014 Belanja juga mengalami perkembangan sebesar 5,20% atau Rp. 837.723.000.000. Dilihat dari secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa selama periode 2010-2014 APBD Kabupaten Kerinci berfluktuasi.

Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2009:61) dalam buku akuntansi sektor publik “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran” sedangkan menurut Halim (2007:164) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun.

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Menurut Halim (2007:177) “Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dadang Solihin, Bappenas (2007) menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moito (2010) menyatakan persektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim 2008: 230).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Mahsun, dkk (2011: 81) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2017 sampai bulan Agustus 2018.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder (Sarwono, 2006:138) yaitu data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif ini adalah data yang berbentuk skema, angka, kalimat, dan gambar. Jenis data kualitatif ini ialah data sekunder yaitu data yang telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang disajikan dalam angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya.

Metode dan Alat Analisis Data

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang merupakan alat untuk meneliti dengan melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Sarwono, 2006:138).

Alat Analisis Data

Mengevaluasi kinerja keuangan daerah alat analisis yang digunakan menurut (Halim, 2001) adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Halim, 2001:127).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,00	Baik
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991, dalam IDewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Halim, 2001:127).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 2
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah. (Halim, 2001:127). Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Penilaian PAD Terhadap TPD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM.

4. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2001:127). Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti Tabel berikut:

Tabel 4
Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas

Prosentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di Atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri

5. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan (Halim, 2001:127). Berikut formula untuk mengukur tingkat Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3.5)$$

Pendapatan Daerah

Kriteria untuk menetapkan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Penilaian Efisiensi

Prosentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100% ke atas	Tidakefisien
90%-100%	Kurangefisien
80%-90%	Cukufefisien
60%-80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangatefisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 6
Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Kerinci

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
1.	2008	31.199.886.790,29	454.081.834.044,00	6,87
2.	2009	20.818.507.570,18	447.218.166.963,00	4,65
3.	2010	30.525.808.160,56	449.806.530.879,00	6,78
4.	2011	34.923.688.018,83	498.122.506.258,83	7,01
5.	2012	31.916.549.263,33	588.567.045.360,00	5,42
6.	2013	36.444.631.039,32	645.257.262.357,00	5,96
7.	2014	55.550.777.965,91	673.545.200.956,00	6,12
8.	2015	59.000.000.000,00	781.144.130.000,00	7,55
Jumlah				50,36
Rata-rata				6,29

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 6 diatas rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan peningkatan persentase yang fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun anggaran 2008 tingkat rasio kemandirian keuangan daerah menjadi sebesar 6,87%, pada tahun 2009 mengalami penurunan persentase menjadi sebesar 4,65%, Pada tahun anggaran 2010 rasio kemandirian keuangan daerah naik menjadi sebesar 6,78%, pada tahun anggaran 2011 naik kembali menjadi 7,01%, kemudian turun pada tahun anggaran 2012 menjadi 5,42%, dan pada tahun anggaran 2013 naik menjadi sebesar 5,96%, pada periode tahun anggaran 2014 kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 6,12%, dan pada tahun 2015 mengalami jauh peningkatan yakni menjadi sebesar 7,55%.

Pada tabel 6 di atas rata-rata rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008-2015 adalah sebesar 6,29% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Kerinci tingkat kemandirian keuangan nya tergolong dalam kategori **Sangat Baik** (Lihat Tabel 1 : Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah).

Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio kemandirian Kabupaten Kerinci berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Kerinci terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah.

Rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada Kabupaten Kerinci dalam membiayai sendiri kegiatannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci sangat aktif dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan fiskal daerah setiap tahunnya, hal tersebut tentunya harus pula didukung dengan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Terjadinya peningkatan kinerja PAD setiap tahunnya selama periode tahun 2008 sampai 2015, diikuti dengan peningkatan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.

Tabel 7
Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Kerinci

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)
1.	2008	399.876.567.750,00	521.789.650.000,00	76,63
2.	2009	459.876.900.000,00	598.567.890.700,89	76,82
3.	2010	485.548.368.510,00	621.197.203.730,17	78,16
4.	2011	595.862.275.887,83	719.948.362.253,38	82,76
5.	2012	671.687.802.778,50	776.947.259.095,58	86,45
6.	2013	752.487.693.343,00	849.244.690.795,29	88,60
7.	2014	791.670.296.984,00	913.499.562.749,06	88,66
8.	2015	869.788.980.700,00	978.988.666.560,34	88,84
Jumlah				666,92
Rata-rata				83,36

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 7 diatas rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan peningkatan persentase yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun anggaran 2008 tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah menjadi sebesar 76,63%, pada tahun anggaran 2009 adanya kenaikan rasio ketergantungan keuangan daerah menjadi sebesar 76,82%, pada tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan menjadi sebesar 78,16%, naik pada tahun anggaran 2011 menjadi 82,76%, pada tahun anggaran 2012 kenaikan menjadi 86,45%, tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar 88,60%, pada tahun anggaran 2014 juga mengalami kenaikan menjadi 88,66%, dan pada tahun anggaran 2015 kembali mengalami kenaikan rasio ketergantungan keuangan daerah menjadi sebesar 88,84%.

Pada tabel 7 di atas rata-rata rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008-2015 adalah sebesar 83,36% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah, Kabupaten Kerinci tingkat ketergantungan keuangannya tergolong dalam kategori *Sangat Tinggi* (Lihat Tabel 2 : Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah). Tingginya persentase menunjukkan peningkatan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Secara umum pada tahun anggaran 2008-2015 tingkat

ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci terhadap pemerintah pusat menunjukkan persentase yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kerinci terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2008-2015 adalah 83,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci maupun sumber pendapatan daerah lainnya sudah optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah sehingga daerah tidak bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui dana perimbangan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Tabel 8
Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Kerinci Tahun 2008-2015

No	Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi (%)
1.	2008	31.199.886.790,29	81.884.278.209,31	38,10
2.	2009	20.818.507.570,18	61.091.005.335,47	34,08
3.	2010	30.525.808.160,56	109.834.809.918,17	27,79
4.	2011	34.923.688.018,83	124.086.086.365,55	28,14
5.	2012	31.916.549.263,33	96.367.974.837,08	33,11
6.	2013	36.444.631.039,32	84.044.631.040,09	43,36
7.	2014	55.550.777.965,91	99.745.228.695,06	55,69
8.	2015	59.000.000.000,00	123.269.000.000,58	47,86
Jumlah				308,13
Rata-rata				38,52

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 8 diatas rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah menunjukkan peningkatan persentase yang naik turun atau berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun anggaran 2008 tingkat desentralisasi fiskal menjadi sebesar 38,10%, Pada tahun anggaran 2009 tingkat desentralisasi fiskal mengalami penurunan menjadi sebesar 34,08%, pada tahun anggaran 2010 turun tingkat desentralisasi fiskal menjadi sebesar 27,79%, naik pada tahun anggaran 2011 menjadi 28,14%, pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan menjadi 33,11%, kemudian tahun anggaran 2013 naik kembali menjadi sebesar 43,36%, dan pada tahun anggaran 2014 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 55,69%, pada tahun anggaran 2015 kembali mengalami penurunan persentase tingkat desentralisasi fiskal menjadi sebesar 47,86%.

Pada 8 di atas rata-rata rasio tingkat desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008-2015 adalah sebesar 38,52% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian desentralisasi fiskal keuangan daerah, Kabupaten Kerinci tingkat desentralisasi fiskal keuangannya tergolong dalam kategori *Cukup* (Lihat Tabel 3 : Kriteria Penilaian desentralisasi fiskal Keuangan Daerah).

Cukupnya derajat desentralisasi disebabkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah lebih besar dari peningkatan total penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Cukupnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan kabupaten kerinci selama tahun anggaran 2008-2015 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Hal inimenunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan

tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Akan tetapi, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci cukup dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 9
Efektifitas Keuangan Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2008-2015

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
1.	2008	521.799.765.777,64	509.299.208.659,47	102,45
2.	2009	492.847.440.269,07	464.775.457.537,39	106,04
3.	2010	541.888.201.972,56	510.680.208.812,39	106,11
4.	2011	630.785.963.906,66	609.705.834.491,59	103,45
5.	2012	712.495.833.521,83	680.388.364.800,00	104,71
6.	2013	801.644.690.794,52	804.070.506.154,00	99,69
7.	2014	869.305.112.019,91	861.204.537.270,00	100,94
8.	2015	985.014.800.457,00	918.019.900.123,60	107,30
Jumlah				830,69
Rata-rata				103,84

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 9 di atas rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008-2015 menunjukkan peningkatan persentase yang terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan persentase yang berfluktuasi. Pada tahun anggaran 2008 tingkat efektifitas keuangan daerah menjadi sebesar 102,45%, pada tahun anggaran 2009 tingkat efektifitas keuangan daerah naik menjadi sebesar 106,04%, tahun anggaran 2010 tingkat efektifitas keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar 106,11%, penurunan pada tahun anggaran 2011 menjadi 103,45%, pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan menjadi 104,71% tahun anggaran 2013 mengalami jauh penurunan menjadi 99,69 %, kemudian tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan menjadi 100,94%, tahun anggaran 2015 tingkat efektifitas kembali mengalami kenaikan persentase menjadi sebesar 107,30%.

Pada tabel 9 di atas rata-rata rasio tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008-2015 adalah sebesar 103,84% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian efektifitas keuangan daerah, Kabupaten Kerinci tingkat efektifitas keuangannya tergolong dalam kategori *Sangat Efektif* (Lihat Tabel 4 : Kriteria Penilaian efektifitas Keuangan Daerah).

Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kerinci dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kerinci harus tetap mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program

kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan pendapatan asli daerah. Dari keseluruhan hampir semua tahun anggaran tingkat efektivitasnya dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2013 yang tingkat efektivitasnya hanya termasuk dalam kriteria efektif. Pemerintah Daerah kabupaten kerinci menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik dikarenakan kabupaten kerinci dapat mengefektifkan realisasi pendapatan.

Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

Tabel 10
Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2008-2015

No	Tahun	Pengeluaran Belanja (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
1.	2008	526.614.698.147,03	521.799.765.777,69	100,92
2.	2009	457.212.383.533,48	492.847.440.269,07	92,77
3.	2010	524.216.596.167,50	541.888.201.972,56	96,73
4.	2011	649.338.162.600,21	630.785.963.906,66	102,94
5.	2012	720.534.368.171,29	712.495.833.521,83	101,12
6.	2013	796.337.130.989,66	801.644.690.794,52	99,33
7.	2014	837.723.445.266,43	869.305.112.019,91	96,36
8.	2015	910.108.107.752,10	985.909.200.457,00	92,31
Jumlah				782,48
Rata-rata				97,81

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Tabel 10 diatas rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008-2015 menunjukkan peningkatan persentase yang berfluktuasi. Pada tahun anggaran 2008 tingkat efisiensi keuangan daerah menjadi sebesar 100,92%, pada tahun anggaran 2009 tingkat efisiensi keuangan daerah menurun menjadi 92,77%, tahun anggaran 2010 tingkat efisiensi keuangan daerah naik menjadi sebesar 96,73%, naik pada tahun anggaran 2011 menjadi 102,94%, pada tahun anggaran 2012 terjadi penurunan menjadi 101,12%, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 99,33%, kemudian tahun anggaran 2014 juga mengalami penurunan menjadi 96,36%, dan tahun anggaran 2015 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi keuangan daerah menjadi sebesar 92,31%.

Pada tabel 10 di atas rata-rata rasio tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2008-2015 adalah sebesar 97,81% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah, Kabupaten Kerinci tingkat efisiensi keuangannya tergolong dalam kategori *Tidak Efisien* (Lihat Tabel 5 : Kriteria Penilaian efisiensi Keuangan Daerah).

Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2011 dan 2012 Kabupaten Kerinci sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya.. Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten Kerinci dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya sehingga kedepan dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008-2015 dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11
Rasio Keuangan Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2008-2015

No.	Rasio	Tahun								Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Kemandirian	6,87%	4,65%	6,78 %	7,01 %	5,42%	5,96 %	6,12 %	7,55 %	6,29%
	Kriteria	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Ketergantungan	67,45 %	68,69 %	78,16 %	82,76 %	86,45 %	88,60 %	88,66 %	81,84 %	83,36%
	Kriteria	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.	Desentralisasi fiskal	38,10 %	34,08 %	27,79 %	28,14 %	33,11 %	43,36 %	55,69 %	47,86 %	38,52%
	Kriteria	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Cukup	Baik	Sangat Baik	baik	Cukup
4.	Efektifitas	102,45 %	106,04 %	106,11 %	103,45 %	104,71 %	99,69 %	100,94 %	107,30 %	103,84 %
	Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
5.	Efisiensi	100,92 %	92,77 %	96,73 %	102,94 %	101,12 %	99,33 %	96,36 %	92,31 %	97,81%
	Kriteria	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien

Tabel 11 diatas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pada Tahun 2008 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 6,87% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 67,45%, Rasio Desentralisasi Fiskal cukup yaitu 38,10%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 102,45%, dan Rasio Efisiensi tidak efisien yaitu sebesar 100,92%. Pada Tahun 2009 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 4,65% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 68,69%, Rasio Desentralisasi Fiskal cukup yaitu 34,08%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 106,04%, dan Rasio Efisiensi kurang efisien yaitu sebesar 92,77%. Pada Tahun 2010 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 6,78% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 78,16%, Rasio Desentralisasi Fiskal Sedang yaitu 27,79%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 106,11%, dan Rasio Efisiensi kurang efisien yaitu sebesar 96,73%.

Tahun 2011 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 7,01% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 82,76%, Rasio Desentralisasi Fiskal Sedang yaitu 28,14%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 103,45%, dan Rasio Efisiensi Tidak Efisien yaitu sebesar 102,94%. Tahun 2012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 5,42% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 86,45%, Rasio Desentralisasi Fiskal Cukup yaitu 33,11%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 104,71%, dan Rasio Efisiensi Tidak Efisien yaitu sebesar 101,12%. Tahun 2013 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 5,96% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 88,60%, Rasio

Desentralisasi Fiskal Baik yaitu 43,36%, Rasio Efektifitas Efektif yaitu sebesar 99,69%, dan Rasio Efisiensi Kurang Efisien yaitu sebesar 96,33%. Tahun 2014 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 6,12% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 88,66%, Rasio Desentralisasi Fiskal Sangat Baik yaitu 55,69%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 100,94%, dan Rasio Efisiensi Kurang Efisien yaitu sebesar 96,36%. Pada Tahun 2015 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sangat Baik yaitu sebesar 7,55% Rasio Ketergantungan Daerah Sangat Tinggi yaitu sebesar 81,84%, Rasio Desentralisasi Fiskal Baik yaitu 47,86%, Rasio Efektifitas Sangat Efektif yaitu sebesar 107,30%, dan Rasio Efisiensi kurang efisien yaitu sebesar 92,31%.

Dilihat Dari Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008-2009 Rasio Kemandirian sangat baik, Rasio Ketergantungan sangat tinggi, Rasio Desentralisasi Fiskal cukup, Rasio Efektifitas sangat efektif, Rasio Efisiensi kurang efisien dan tidak efisien. Sehingga tahun 2008-2009 Kabupaten Kerinci mendapatkan opini (tidak memberikan pendapat) ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci masih banyak terjadi salah saji secara material. Pada tahun 2010-2013 Rasio Kemandirian sangat baik, Rasio Ketergantungan sangat tinggi, Rasio Desentralisasi Fiskal sedang, cukup, dan baik. Rasio Efektifitas sangat efektif, dan efektif, Rasio Efisiensi kurang efisien dan tidak efisien. Sehingga tahun 2010-2013 Kabupaten Kerinci mendapatkan opini (wajar dengan pengecualian/WDP) ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci masih ada kemungkinan terjadi salah saji yang material.

Sedangkan Pada Tahun 2014-2015 Rasio Kemandirian sangat baik, Rasio Ketergantungan sangat tinggi, Rasio Desentralisasi Fiskal sangat baik dan baik, Rasio Efektifitas sangat efektif dan Rasio Efisiensi kurang efisien. Dari kelima rasio tersebut menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Kerinci lebih bagus dibandingkan pada tahun 2008-2013 sehingga Kabupaten Kerinci mendapatkan opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP) yang berarti bahwa laporan Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008-2015, maka diperoleh kesimpulan kinerja keuangan pemerintah keuangan daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008-2015 tingkat kemandirian keuangan daerah *Sangat Baik*. Dikarenakan peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci sangat aktif dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah *Sangat Tinggi*. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan asli daerah sudah optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah. Tingkat desentralisasi fiskal keuangan daerah *Cukup*. Cukupnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan Kabupaten Kerinci selama tahun anggaran 2008-2015 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Tingkat efektifitas keuangan daerah *Sangat efektif*. Dikarenakan keseluruhan hampir semua tahun anggaran tingkat efektifitasnya dikatakan sangat efektif, kecuali tahun 2013 yang tingkat efektifitasnya hanya termasuk dalam kriteria efektif. Pemerintah Daerah kabupaten kerinci menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik dikarenakan kabupaten kerinci dapat mengefektifkan realisasi pendapatan. Tingkat efisiensi keuangan daerah *Tidak Efisien* hal ini dikarenakan kemampuan daerah di Kabupaten Kerinci didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena masih mengalami rasio yang naik turun atau berfluktuasi, kinerja pemerintah terjadi pemborosan dalam membiayai pembangunan yang tidak optimal.

REFERENSI

- Ayu Puspita Sari, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2012*. Skripsi. Malang
- Bappenas, 2003, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bappenas, 2007, *Rencana Kerja Pemerintah Taun 2008*, Buku 1, Jakarta
- Bastian Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit erlangga, Jakarta
- Bisma, I Dewa Gde Dan Hery Susanto, 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal. Ganec Swara Edisi Khusus Vol 4 No.3, Mataram.
- Erlina, 2008, *Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta.
- Francisco Bwariat, 2013, *Kemandirian Keuangan Dalam Otonomi Daerah*, Artikel Didownload Kamis, 12 Desember 2013.
- Halim Abdul, 2008, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta.
- Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga. Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta Raja Grafindo, Persada.
- Machmud Masita, Gerge Kawung Dan Wensi Rompas.2014, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2007-2012*. Jurnal, Manado.
- Mahsun Moh, 2006 *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun Moh, Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2002, *Manajemen Kinerja sektor publik*, unit penerbit dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mamesah, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009 *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta.
- Machmud Masita, Gerge Kawung Dan Wensi Rompas.2014, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2007-2012*. Jurnal, Manado.
- Nataluddin, 2001, *Otonomi dan Keuangan Daerah*, Gemilang, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Puspitasari Ayu Febriyanti. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2001*. Jurnal, Malang.
- Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Skousen smith, 2009, *akuntansi keuangan daerah*, edisi sembilan penerbit Jakarta.
- Solikin, 2006, *Analisa Rasio Keuangan APBD Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Suprpto, 2006, *Analisa Rasio Keuangan*. Yogyakarta. Liberty
- Widodo, 2002, *Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Yin.Robert, 2006, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.